

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis tentang tinjauan diskresi kepolisian terhadap anak pelaku tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Diskresi kepolisian adalah merupakan bagian dari proses diversi dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan secara eksplisit diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Diskresi kepolisian terhadap anak pelaku tindak pidana dilakukan berdasarkan batasan usia dari anak pelaku tindak pidana, yaitu anak pelaku tindak pidana berusia di bawah 12 (dua belas tahun) dan anak yang berusia di antara 12 – 18 tahun.

Penerapan yang dilakukan terhadap anak pelaku tindak pidana yang berusia di bawah 12 tahun yaitu penyidik meminta saran tertulis dari petugas pembimbing kemasyarakatan/badan pemasyarakatan, setelah itu penyidik, petugas pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional mengambil keputusan diversi. Tidak ada proses penyidikan.

Sedangkan penerapan yang dilakukan terhadap anak pelaku tindak pidana yang berusia 12-18 tahun, pelaksanaannya dilakukan melalui musyawarah di antara orang tua/wali anak pelaku tindak pidana, orang tua/wali korban tindak pidana, petugas pembimbing kemasyarakatan atau petugas badan pemasyarakatan untuk mencapai kesepakatan. Hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara diversi beserta kesepakatan, setelah itu disampaikan kepada pengadilan negeri sesuai daerah hukum dan dibuatkan penetapan oleh pengadilan negeri.

B. Saran

1. Perlu adanya perubahan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga terdapat pengaturan yang lebih jelas dan tegas tentang diskresi kepolisian pada anak pelaku tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Mulyono, 1984, *Pendekatan Analisis Yuridis Remaja dan Penanggulangannya*, Kanisius, Yogyakarta
- Bryan A. Garner, 1999, *Black Law's Dictionary*, Seventh Edition, West Group, ST. Paul,
- Kartini Kartono, 1986, *Patologi Sosial 2*, Rajawali Press, Jakarta
- Moeljatno, 2002, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip Press
- Romli Atmasasmita, 1983, *Problem Kenakalan Anak – Anak Remaja*, Amico, Bandung
- Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolsian*, LaksBang Preessindo, Yogyakarta
- Satjipto Rahardjo, 1991, *Polisi Pelaku Pemikir*, Gramedia Pustaka Utama
- Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Gentha Publishing, Yogyakarta
- Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung
- Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<http://wikipedia.org>. Ensiklopedi Bebas Berbahasa Indonesia,

Kamus Besar Bahasa Indonesia

